



Pengaruh strategi pengelolaan anggaran, investasi publik, dan manajemen keuangan publik dalam mewujudkan bonus demografis di Jawa Barat

Viendy Lugina Handy

Universitas Padjajaran

Viendyl.Handy@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel: Diterima 13 November 2023 Disetujui 18 Desember 2023 Diterbitkan 28 Desember 2023</p>	<p>Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan mengalami peningkatan demografi antara tahun 2015 dan 2045. Konsep bonus demografi mengacu pada situasi di mana penduduk usia kerja merupakan mayoritas dalam suatu populasi tertentu. Fenomena ini dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan berpotensi merugikan bagi wilayah Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai dampak variabel independen seperti strategi alokasi anggaran publik, investasi publik, dan pengelolaan keuangan publik terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan bonus demografi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh teknik pengelolaan keuangan daerah, investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Studi ini menggambarkan besarnya pengaruh pemerintah dalam pengalokasian anggaran, dengan fokus mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang sesuai. Selain itu, investasi pemerintah di bidang infrastruktur diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang efektif juga dinilai penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kerangka bonus demografi.</p>
<p>Kata kunci: Bonus demografi; Strategi alokasi anggaran; Investasi publik; Manajemen keuangan publik; Pertumbuhan ekonomi</p>	<p>ABSTRACT <i>The province of West Java is projected to see a demographic boost between the years 2015 and 2045. The concept of a demographic bonus refers to a situation in which the working-age population holds a significant majority within a certain population. This phenomenon may provide both advantageous and potentially detrimental implications for the region of West Java. The aim of this study is to present a comprehensive analysis of the impact of independent variables, such as public budget allocation strategies, public investment, and public financial management, on the dependent variable of Economic growth in West Java. The ultimate goal is to harness the demographic bonus in the region. The present study employs a quantitative methodology, using secondary data obtained from many sources. The findings of this research suggest that economic development is influenced by regional financial management techniques, public investment, and local government financial management. This study illustrates the substantial influence of the government in the allocation of budgets, with a focus on directing resources towards appropriate sectors. Additionally, public investment in infrastructure is identified as a key factor in facilitating community mobility. Furthermore, the effective management of finances is deemed critical in endeavors to bolster economic growth within the framework of the demographic bonus.</i></p>
<p>Keywords : Demographic bonus; Budget allocation strategy; Public investment; Public financial management; Economic growth</p>	<p>©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p>

PENDAHULUAN

Terjadinya bonus demografi diproyeksikan terjadi pada periode 2015-2045 di Provinsi Jawa Barat. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk produktif di Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan melebihi jumlah penduduk non-produktif. Situasi demografis di Jawa Barat saat ini dapat dilihat sebagai bonus demografi karena memberikan peluang yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kehadiran angkatan kerja yang lebih besar, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah pekerja sejalan dengan peningkatan angkatan kerja, sehingga berpotensi menambah jumlah penduduk usia kerja dan selanjutnya menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita (Muhaemin, 2021).

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif Jawa Barat 2015-2045

No.	Proyeksi	Tahun						
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk umur 16-64 Tahun (%)	68,1%	69,2%	69,4%	68,8%	67,7%	66,6%	65,8%
2	Jumlah Total Penduduk (Ribuan)	46.805,0	49.565,0	52.226,4	54.739,9	56.974,0	58.839,1	60.315,3

Sumber : (Bappenas, 2018)

Berdasarkan tabel 1. terlihat persentase penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 69,4% dari total penduduk di Jawa Barat pada tahun 2025 dan 65,8% dari total penduduk di Jawa Barat pada tahun 2045. Hal ini memberikan manfaat bagi Provinsi Jawa Barat dari sisi demografi yang kemudian disebut dengan Bonus Demografi. Bonus Demografi merupakan suatu keadaan dimana peningkatan usia produktif yang disertai dengan penurunan proporsi penduduk muda yaitu penduduk usia 0-14 tahun dapat memberikan manfaat dalam pembangunan Indonesia. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan apabila mereka dibekali dengan pendidikan, keterampilan, kesehatan dan tersedia kesempatan bagi mereka untuk berkembang (Prasarti & Prakoso, 2020). Dividen demografi mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara melalui tiga cara berbeda, yaitu: penyediaan tenaga kerja (labor supply), akumulasi modal manusia (human capital), dan akumulasi tabungan (*assessment*) (Bloom et al., 2015). Melimpahnya pasokan tenaga kerja, khususnya penduduk pada rentang usia produktif, berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan peluang investasi dan promosi pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, bonus demografi mempunyai pengaruh yang besar terhadap investasi sumber daya manusia, karena hal ini ditandai dengan populasi yang menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan dan peningkatan umur panjang. Meningkatnya angka harapan hidup telah meningkatkan kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan serta pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, terkait dengan tabungan finansial, penurunan jumlah tanggungan dalam sebuah rumah tangga memungkinkan individu pada masa kerja puncak untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk tabungan atau investasi yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Peningkatan tabungan berpotensi merangsang peningkatan tingkat investasi dan mendorong ekspansi ekonomi (Bloom et al., 2015; Muhaemin, 2021).

Terlepas dari peluang yang timbul, bonus demografis-pun hadir dengan tantangan dan ancaman yang perlu dicermati. Jika pemerintah dari wilayah yang mendapatkan bonus demografi berhasil memanfaatkan bonus tersebut, maka bonus tersebut memiliki peran yang signifikan dalam membantu rencana suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun sebaliknya jika pemerintah dari wilayah yang mendapatkan bonus tersebut gagal dalam memanfaatkan bonus tersebut, maka bonus tersebut akan menjadi bencana demografi. Fenomena bencana demografi dapat terjadi ketika terdapat pertumbuhan signifikan pada populasi usia kerja yang tidak dapat diserap atau dieksploitasi secara efektif. Krisis demografis ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya prospek kerja, tingginya tingkat pengangguran, dampak sosial yang merugikan, berkurangnya kapasitas untuk mengumpulkan tabungan atau tunjangan, dan meningkatnya tingkat kemiskinan (Kominfo, 2014).

Dalam rangka memanfaatkan bonus demografi dengan optimal, diperlukan strategi yang tepat sasaran dan efektif. Salah satu strategi potensial untuk memaksimalkan bonus demografi adalah dengan memprioritaskan pengembangan populasi usia kerja yang sehat, berkemampuan intelektual, dan rajin (Purwanto, 2017). Menurut Dr. Sugiarto Sumas, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, terdapat minimal empat bidang fokus penting. Bidang-bidang ini mencakup perlindungan penduduk pekerja untuk memastikan keterlibatan mereka dalam angkatan kerja tidak

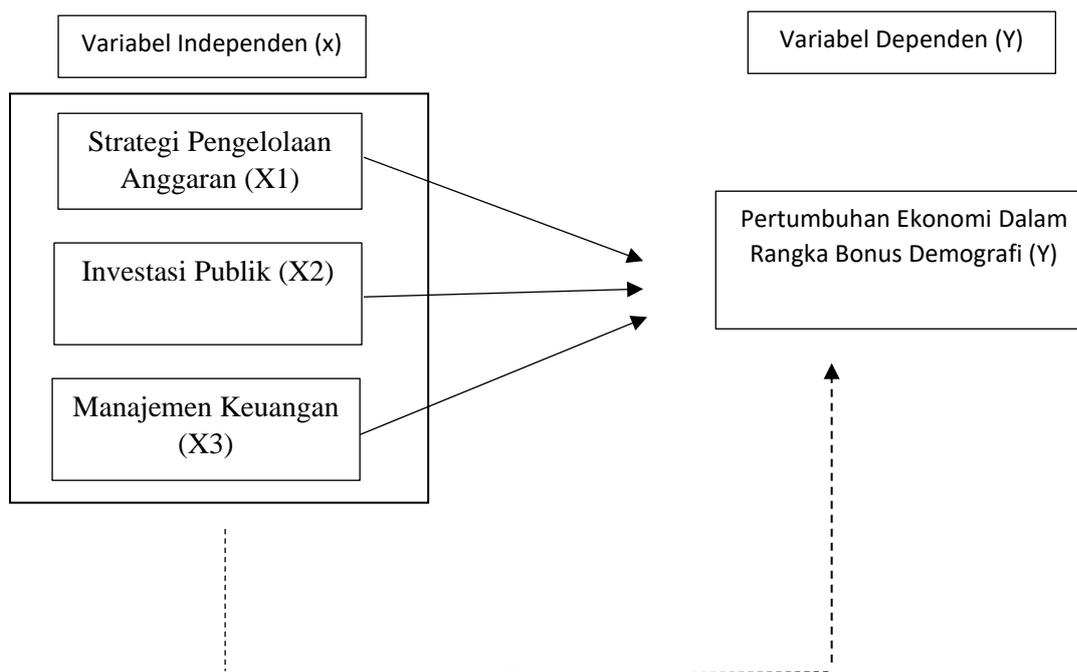
terputus, memfasilitasi penciptaan peluang kerja bagi angkatan kerja yang akan datang, memungkinkan angkatan kerja yang ada untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan mempersiapkan angkatan kerja baru secara memadai untuk memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. tuntutan pasar (Purwanto, 2017). Berdasarkan perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran populasi pekerja yang terdidik dan sehat secara fisik memainkan peran penting dalam memfasilitasi penggunaan bonus demografi secara efektif, sehingga memberikan hasil yang baik bagi kemajuan ekonomi. Untuk mencapai tujuan membangun sumber daya manusia yang terdidik dan sehat secara fisik, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan aspek ini dalam pelaksanaan kebijakan publik. Perhatian juga harus diarahkan pada alokasi anggaran publik, yang mencakup pemanfaatan dana publik di berbagai sektor dan program, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi sumber daya yang tepat di bidang-bidang ini dapat secara efektif meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari bonus demografi. Selain itu, investasi publik mencakup aspek-aspek lain, termasuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan perbaikan sistem angkutan umum untuk meningkatkan mobilitas. Hal ini juga mencakup investasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan fasilitas kesehatan. Ketiga, pengelolaan keuangan publik yang efektif mencakup administrasi keuangan publik yang bijaksana, pengaturan pengeluaran, dan pengawasan anggaran yang cermat. Pengelolaan yang efektif mempunyai peran penting dalam memastikan penggunaan dana publik secara optimal, khususnya dalam rangka memaksimalkan potensi manfaat bonus demografi, yang diharapkan dapat merangsang pembangunan ekonomi.

Penelitian terkait peluang maupun ancaman dari bonus demografi kerap dilakukan secara kualitatif, seperti penelitian yang dilakukan Muhaemin (2021), pernyataan ini menyoroti perlunya menerapkan kebijakan yang mendukung untuk memanfaatkan bonus demografi secara efektif. Kebijakan tersebut mencakup beberapa sektor, antara lain kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan perekonomian. Penegasan tersebut ditegaskan dalam RPJMD Jawa Barat 2018-2023, dimana tiga kebijakan yang bertujuan memanfaatkan bonus demografi dimasukkan ke dalam program unggulan dan mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Kemudian dalam penelitian Penelitian Andriani et al. (2018), yang menjelaskan bahwa Sumatera Barat gagal dalam optimalisasi bonus demografis dikarenakan tingginya presentase penduduk Sumatra Barat yang melakukan migrasi dengan alasan; faktor budaya, faktor geografi, hingga faktor pendidikan dimana adanya dorongan bagi masyarakat Sumatra Barat untuk merantau menimba ilmu, Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat diidentifikasi sebagai salah satu komponen yang berkontribusi terhadap terhambatnya optimalisasi pendidikan, karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan secara memadai menyebabkan banyak orang dalam usia produktif memilih untuk pindah dari lokasi mereka masing-masing. Akibatnya, eksodus ini menghambat proses optimalisasi di wilayah tersebut. Kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan yang mendukung juga terjadi di Papua dalam penelitian Putro (2016), studi ini, yang tujuan utamanya menyelidiki bonus demografi di Papua, mengungkapkan perbedaan yang signifikan pada semua dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di antara penduduk Papua, serta pola perubahan koefisien Gini setiap tahunnya. Selain itu, dijelaskan bahwa Papua menunjukkan rasio buta huruf yang relatif tinggi, angka harapan hidup yang menurun, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan kemiskinan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Penelitian tersebut meneguhkan pernyataan betapa pentingnya kesehatan dan pendidikan guna optimalisasi bonus demografi. Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu bidang yang perlu diperhatikan dalam upaya mengejar keberhasilan pemanfaatan bonus demografis yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian belum ada penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana strategi pengelolaan anggaran publik, investasi publik, dan manajemen keuangan publik di Jawa Barat sebagai salah satu cara dalam memastikan bahwa perencanaan pemerintah sudah tepat sasaran atau sesuai dengan bidang yang membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai dampak variabel independen yaitu alokasi anggaran publik, investasi publik, dan pengelolaan keuangan publik terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan bonus demografi yang ada di Jawa Barat untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks bonus demografi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dimana data numerik diperiksa dan kemudian dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Penjelasan deskriptif hubungan ini didasarkan pada temuan empiris uji hipotesis (Hartono, 2013). Penelitian ini menggunakan data keuangan sekunder yang bersumber dari laman resmi pemerintah Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh faktor independen (alokasi anggaran, investasi, dan pengelolaan keuangan publik) terhadap variabel dependen (pembangunan ekonomi) dalam rangka mencapai bonus demografi berkelanjutan di wilayah Jawa Barat. Kesimpulan utama dan saran kebijakan telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis statistik. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menguji ide-ide secara empiris dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika operasional metode pengelolaan anggaran, investasi publik, dan pengelolaan keuangan dalam konteks dividen demografi yang berkelanjutan. Penelitian ini mencakup populasi dan sampel yang terdiri dari 26 Pemerintah Daerah di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022, sebagaimana terdokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang bersumber dari portal data Kementerian Keuangan yang dapat diakses publik melalui internet di <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, serta data yang diberikan dalam makalah lainnya. "Produk Domestik Bruto Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2018-2022" yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Kerangka Pemikiran



Tabel 2. Definisi Konseptual Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Konseptual	Pengukuran Variabel
Strategi Pengelolaan Anggaran (X1)	Teknik ini berkaitan dengan operasionalisasi konsep, penyusunan strategi, dan pelaksanaan suatu tugas dalam jangka waktu tertentu, sekaligus menyelaraskan alokasi anggaran dengan tujuan	$SPA = \frac{[(Alokasi Pendidikan + Alokasi Kesehatan)]}{Jumlah Total Anggaran} \times 100\% \quad (1)$

Variabel Penelitian	Definisi Konseptual	Pengukuran Variabel
Investasi Publik (X2)	yang dimaksudkan (Hidayat & Nursetiawan, 2022) Investasi pemerintah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan berfokus pada kemajuan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.	$IP = \frac{\text{Alokasi Infrastruktur}}{\text{Jumlah Total Anggaran}} \times 100\% \quad (2)$
Manajemen Keuangan (X3)	Mengenai berbagai aspek mobilisasi sumber daya dan belanja manajemen di sektor publik, referensi dapat dibuat pada makalah kebijakan ACCA sebagaimana dikutip dalam karya Saikh dan Naeem pada tahun 2013.	$MK = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (3)$
Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Bonus Demografi (Y)	Pertumbuhan Ekonomi yang dapat dinilai dari laju PDRB dalam rangka pemanfaatan bonus demografi yang merupakan suatu kondisi dimana usia produktif mendominasi populasi yang diasumsikan dapat meningkatkan jumlah SDM produktif. (Nasution, 2021)	$PE = \frac{\text{PDRB tahun berjalan} - \text{PDRB tahun sebelum}}{\text{PDRB tahun sebelum}} \times 100\% \quad (4)$

Analisis Pengaruh

Uji pengaruh dilakukan untuk menguji pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda, karena melibatkan pemanfaatan berbagai variabel independen untuk menilai variabel dependen (Devi et al., 2023). Selain itu, model regresi linier berganda digunakan, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PerEkonomiy = a + b_1SPA_1 + b_2IP_2 + +b_3MK_3 + \varepsilon \quad (5)$$

Keterangan:

<i>PerEkonomiy</i>	: Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Bonus Demografi
<i>a</i>	: <i>Contant</i>
<i>SPA₁</i>	: Sistem Pengelolaan Anggaran
<i>IP₂</i>	: Investasi Publik
<i>MK₃</i>	: Manajemen Keuangan
<i>ε</i>	: <i>Standard Error</i>

Pengujian Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai tanggapan sementara terhadap suatu topik penelitian yang kemudian diuji secara empiris untuk memastikan adanya jawaban atau hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melakukan pengujian hipotesis, dimana penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian bergantung pada tingkat signifikansinya. Kajian ini juga memuat teori-teori, khususnya:

H1 : Strategi Alokasi Anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka bonus demografi di Provinsi Jawa Barat

- H2 : Investasi Publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka bonus demografi di Provinsi Jawa Barat
 H3 : Manajemen Keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka bonus demografi di Provinsi Jawa Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti sering melakukan pengujian analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran atau gambaran mengenai variabel yang diteliti. Data mengenai APBD, alokasi anggaran, dan indikator pertumbuhan ekonomi periode 2018-2022 diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan. Data ini dikumpulkan dari 27 kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat. Informasi berikut berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari studi statistik deskriptif.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	108	-3,80	7,85	3,3212	3,05245
Strategi Pengelolaan Keuangan	108		,27	,2573	,00604
Investasi Publik	108	,25	,30	,2263	,02268
Manajemen Keuangan	108	,18	1,30	1,0069	,11274
Valid N (listwise)	108	,70			

Sumber : Hasil Data Diolah (SPSS)

Berdasarkan data pada Tabel 3, nilai rata-rata variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 3,3212. Nilai ini diatas standar deviasi, menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan perekonomian Pemprov Jabar. Nilai pertumbuhan ekonomi terendah yaitu -3,80 terdapat pada kabupaten karawang tahun 2020 dan pertumbuhan ekonomi tertinggi senilai 7,85 terdapat pada kota cimahi tahun 2019.

Variabel X1 yang mewakili strategi pengelolaan keuangan terlihat di Kota Cimahi pada tahun 2019 dengan nilai terendah sebesar 0,25. Sebaliknya Kota Banjar mempunyai nilai strategi pengelolaan keuangan yang paling besar pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,27. Skor rata-rata strategi pengelolaan keuangan provinsi jawa barat adalah 0,2573 lebih besar dari pada 0,00 yang menandakan pengelolaan keuangan provinsi jawa barat telah dilaksanakan dengan baik.

Variabel investasi public (X₂) pemerintah provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi publik terendah yaitu 0,18 terdapat pada kabupaten sumedang tahun 2018. Sedangkan nilai investasi publik tertinggi yaitu 0,30 terdapat pada kabupaten pangandaran 2021. Nilai rata-rata investasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,22 menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi infrastruktur dan pelayanan publik belum mencukupi.

Variabel manajemen keuangan (X₃) dalam penelitian ini, dengan nilai minimum sebesar 0,70 terdapat pada kota Bandung tahun 2020 dan nilai manajemen keuangan tertinggi terdapat pada kota banjar di tahun 2021 yaitu sejumlah 1,30. Skor rata-rata manajemen keuangan provinsi jawa barat adalah 1,0069 lebih besar dari pada 0,00 yang menandakan sumber daya keuangan provinsi jawa barat telah dimobilisasi dengan baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogrov-Smirnov Test				
	Statistic	d.f.	Asymp. Sig. (2-tailed)	
Unstandardized Residual	0,85	108	0,53	

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Data Diolah (SPSS)

Untuk menilai normalitas data, perlu dilakukan pengujian normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk melakukan uji normalitas. Jika nilai p dari Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Berdasarkan temuan yang ditunjukkan pada Tabel 4 terlihat bahwa Asymp. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,53 berada di atas taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperiksa mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

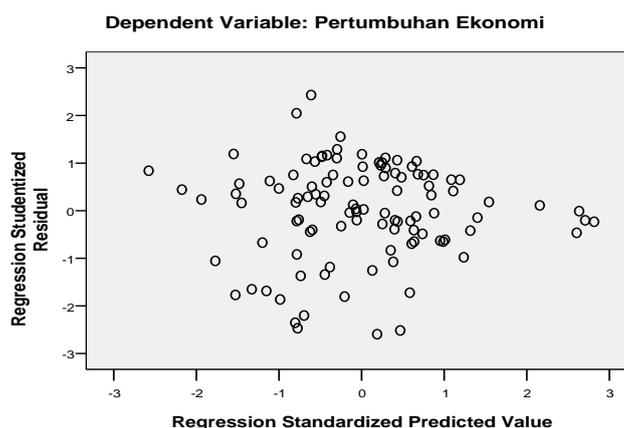
Variable	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Strategi Pengelolaan Keuangan	0,888	1,126
Investasi Publik	0,811	1,232
Manajemen Keuangan	0,905	1,105

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Data Diolah (SPSS)

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas adalah untuk menilai adanya korelasi antar variabel independen. Masalah multikolinieritas harus dihindari dalam model regresi yang dibangun dengan baik. Berdasarkan temuan pada Tabel 5, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada model.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Data Diolah (SPSS)

Grafik *scatterplot* memperlihatkan sebaran titik secara acak, dengan sebaran terlihat di atas dan di bawah tanda nol pada sumbu Y. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Sig.
Strategi Pengelolaan Keuangan	93,637	2,883	0,005
Investasi Publik	23,835	2,731	0,007
Manajemen Keuangan	8,489	4,712	0,000
Konstanta	-34,407		
Adjusted R ²	0,242		
F-statistic	12,370		0,000
F-tabel	2,69		

Sumber : Hasil Data Diolah (SPSS)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -34,407 + 93,637X_1 + 23,835 X_2 + 8,489 X_3 + e \quad (6)$$

Nilai konstanta sebesar -34,407 yang berarti pertumbuhan ekonomi akan bernilai -34,407 apabila strategi pengelolaan keuangan, investasi publik, dan manajemen keuangan konstan atau sama dengan nol (0). Nilai konstanta yang bernilai negative berarti pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat terindikasi adanya underinvestment. Koefisien regresi variabel strategi pengelolaan keuangan (X_1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 93,637 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 kurang dari ambang batas yang telah ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel strategi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama, kenaikan skor strategi pengelolaan keuangan sebesar satu unit diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar 93,63.

Koefisien regresi variabel investasi publik sebesar 23,835 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari ambang batas konvensional sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang mendukung pernyataan bahwa variabel investasi publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Dengan asumsi semua faktor lainnya tetap, peningkatan investasi publik sebesar satu unit oleh pemerintah provinsi Jawa Barat diproyeksikan akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 23,835.

Koefisien regresi variabel pengelolaan keuangan sebesar 8,489 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara pengelolaan keuangan dengan pembangunan perekonomian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari ambang batas konvensional sebesar 0,05 semakin mendukung kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan mempunyai dampak menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila skor pengelolaan keuangan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 8,489 satuan, dengan syarat semua variabel lainnya tetap.

Uji F

Uji F digunakan untuk menilai kesesuaian model terhadap variabel independen. Temuan uji F menunjukkan bahwa metode pengelolaan keuangan, investasi publik, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian provinsi Jawa Barat. Hal ini didukung oleh hasil pengamatan bahwa nilai Fhitung (12,370) melebihi nilai kritis Ftabel (2,69) yang menunjukkan bahwa model tersebut mempunyai dampak simultan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R^2 digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. Berdasarkan tabel regresi, nilai Adjusted R^2 atau Adjusted R-squared dilaporkan sebesar 0,242. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 24% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengaruh Strategi pengelolaan keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Temuan yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan menguntungkan secara statistik antara praktik pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi. Signifikansi statistik variabel strategi keuangan dapat dilihat dari p-value yang diperoleh sebesar α (0,05) atau 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 didukung atau dikonfirmasi.

Strategi pengelolaan keuangan yang dilihat dari perencanaan pengalokasian anggaran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan perencanaan alokasi anggaran yang tepat sasaran akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Hidayat, 2015). Mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah perlu merumuskan strategi pengelolaan keuangan dan mengatur tingkat alokasi sumber daya secara efektif agar dapat mempertahankan laju kemajuan ekonomi (Anitasari & Soleh, 2015). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2015) dan Rasdalima (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdampak terhadap pembangunan perekonomian daerah.

Pengaruh Investasi Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Temuan yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara Investasi Publik dan pertumbuhan ekonomi. Pengamatan terhadap nilai signifikan investasi publik yang kurang dari tingkat alpha yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau lebih spesifiknya 0,0057, menunjukkan adanya temuan penting. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 didukung atau dikonfirmasi.

Pendistribusian anggaran pemerintah dalam bentuk investasi public pada bidang infrastruktur dan pelayanan public mencerminkan pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran utama anggaran sebagaimana dituangkan dalam UU APBN adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong stabilitas perekonomian dan mendorong kemajuan perekonomian. Hal ini sejalan dengan temuan Zahari (2017) dan Mingkid et al. (2017), yang menjelaskan pentingnya belanja pemerintah pada infrastruktur dan jasa.

Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Temuan yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara variabel Pengelolaan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Pengamatan terhadap nilai signifikansi investasi publik yang lebih kecil dari tingkat alpha yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau 0,000 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima.

Pengelolaan keuangan yang efektif berpotensi mendukung pembangunan perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara efektif untuk memfasilitasi pertumbuhan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimawan & Aryani (2019) yang menyatakan bahwa manajemen alokasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik pengelolaan keuangan daerah, investasi publik, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mempunyai dampak terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan peran penting pemerintah dalam mendistribusikan anggaran secara efektif guna memastikan keselarasan anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mendorong kemajuan perekonomian daerah. Investasi yang pemerintah lakukan di bidang infrastruktur dan pelayanan masyarakat memudahkan mobilitas masyarakat memiliki kebutuhan beragam dan laju pertumbuhan yang terus tumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. S., Pitoyo, A. J., & Pangaribowo, E. H. (2018). Ketidaktercapaian bonus demografi: Pembelajaran dari Sumatera Barat. *Populasi : Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.38685>
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>
- Bappenas. (2018). *Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035*. BPS.
- Bloom, D. E., Chatterji, S., Kowal, P., Lloyd-Sherlock, P., McKee, M., Rechel, B., Rosenberg, L., & Smith, J. P. (2015). Macroeconomic implications of population ageing and selected policy responses. *The Lancet*, 385(9968), 649–657. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61464-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61464-1)
- Devi, A. R. M., Praptapa, A., & Farida, Y. N. (2023). Pengaruh spesialisasi auditor, maturitas utang, konservatisme akuntansi, dan kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6), 2613–2622. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2869>
- Hartono, J. (2013). *Metodologi penelitian bisnis*. BPFE Yogyakarta.

- Hidayat, R. (2015). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–25. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1624>
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi pengelolaan aset desa berbasis aplikasi sistem pengelolaan aset desa “sipades” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Kominfo. (2014). *Siapa mau bonus? Peluang demografi Indonesia*. Menteri Komunikasi dan Informatika. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/FA_Buku_Siapa_Mau_Bonus_Final_Web.pdf
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676>
- Muhaemin, N. M. (2021). Bonus demografi Jawa Barat dan perencanaan pembangunan daerah: Sudah siapkah Jawa Barat? *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4(1), 201–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>
- Nasution, M. (2021). Hubungan bonus demografi, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan ketenagakerjaan dengan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 74–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.22122/jurnalbudget.v6i1.74>
- Prasarti, S., & Prakoso, E. T. (2020). Karakter dan perilaku milineal: Peluang atau ancaman bonus demografi. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 10–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/consilia.3.1.10-22>
- Purwanto, E. A. (2017). *Mengoptimalkan bonus demografi*. Berita UGM. <https://ugm.ac.id/id/berita/14623-mengoptimalkan-bonus-demografi/>
- Putro, K. H. (2016). Perencanaan pembangunan di Papua dan bonus demografi 2020 (development planning in Papua and demographic bonus 2020). *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 49–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.37>
- Rasdalima, R. J. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1), 134–145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/16245>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>